

KONTRIBUSI PRAKTIK KERJA LAPANGAN DALAM MENDUKUNG OPTIMALISASI PELAYANAN DAN ADMINISTRASI PERADILAN DI PENGADILAN NEGERI BATAM

Ahmad Safri¹⁾, Musa Rafli Aling kai²⁾

^{1,2}Institut Agama Islam Hidayatullah Batam

¹afri7044@gmail.com, ²alingkairafly@gmail.com

Diterima 24 April 2026, Direvisi 30 Juni 2026, Disetujui 30 Juni 2026

ABSTRAK

Pelayanan administrasi dan peradilan di Pengadilan Negeri Batam dituntut untuk terus meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan seiring dengan perkembangan sistem peradilan berbasis digital serta meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan hukum yang cepat dan akuntabel. Kondisi tersebut memerlukan dukungan berbagai pihak, termasuk perguruan tinggi melalui pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL). Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu bentuk implementasi tridharma perguruan tinggi yang berkontribusi dalam penguatan kompetensi mahasiswa sekaligus mendukung pelayanan pada mitra lembaga. Kegiatan ini bertujuan mendeskripsikan kontribusi mahasiswa PKL dalam mendukung optimalisasi pelayanan dan administrasi peradilan di Pengadilan Negeri Batam. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi, partisipasi langsung, dokumentasi, dan pendampingan selama pelaksanaan PKL. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa memberikan kontribusi pada penguatan pelayanan administrasi perkara, dukungan pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pemahaman implementasi digitalisasi peradilan melalui *e-Court* dan *E-Berpadu*, serta peningkatan literasi praktis mahasiswa terhadap mekanisme persidangan dan produk putusan hakim. Program PKL juga mendukung efektivitas pelayanan melalui bantuan administratif, penguatan tata kelola layanan, serta sinergi antara institusi pendidikan dan lembaga peradilan. Kegiatan ini menunjukkan bahwa PKL tidak hanya menjadi sarana pembelajaran berbasis pengalaman, tetapi juga berkontribusi terhadap optimalisasi pelayanan hukum dan administrasi peradilan. Dengan demikian, PKL dapat menjadi model kolaboratif dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di lembaga peradilan.

Kata kunci: *Praktik Kerja Lapangan; Pelayanan Peradilan; Administrasi Perkara; Optimalisasi Layanan; Pengadilan Negeri.*

ABSTRACT

The administration and judicial services at the Batam District Court are required to continuously improve effectiveness, efficiency, and service quality in line with the development of digital-based judicial systems and the increasing public demand for fast and accountable legal services. This condition requires support from various stakeholders, including higher education institutions through the implementation of Field Work Practice (Practical Work Internship Program/PKL). Field Work Practice (PKL) is one form of higher education tridharma implementation that contributes to strengthening student competencies while also supporting partner institutions' services. This activity aims to describe the contribution of PKL students in supporting the optimization of judicial services and court administration at the Batam District Court. The method used in this activity is a descriptive qualitative approach through observation, direct participation, documentation, and assistance during the internship implementation. The results show that student involvement contributed to strengthening case administration services, supporting the Integrated One-Stop Service (PTSP), understanding the implementation of judicial digitalization through *e-Court* and *E-Berpadu*, and improving students' practical literacy regarding court proceedings and judicial decisions. The internship program also supported service effectiveness through administrative assistance, service governance reinforcement, and synergy between educational institutions and the judiciary. This activity shows that internships are not only a means of experiential learning but also contribute to the optimization of legal services and court administration. Thus, PKL can serve as a collaborative model in improving the quality of public services in judicial institutions.

Keywords: *Field Work Practic; Judicial Service; Case Administration; Service Optimization; District Court.*

PENDAHULUAN

Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan tridharma yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Salah satu bentuk implementasi tridharma yang mampu mengintegrasikan ketiga aspek tersebut adalah Praktik Kerja Lapangan (PKL) (Rhamayanti et al., 2025). Melalui PKL, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengaplikasikan pengetahuan yang diperoleh selama proses pembelajaran ke dalam situasi kerja nyata sekaligus mengembangkan kompetensi profesional melalui pengalaman langsung (Paramitha et al., 2024). Dengan demikian, PKL tidak hanya berfungsi sebagai media pembelajaran berbasis pengalaman, tetapi juga menjadi sarana membangun kolaborasi antara perguruan tinggi dan institusi mitra dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik (Sunusi & Arif, 2025).

Sebagai penyelenggara pelayanan publik di bidang hukum, lembaga peradilan dituntut untuk memberikan pelayanan yang efektif, transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kebutuhan masyarakat pencari keadilan (Adiyanta, 2019). Pelayanan tersebut harus diselenggarakan berdasarkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan serta didukung oleh tata kelola administrasi yang profesional (Nisak, 2020). Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, lembaga peradilan juga terus melakukan transformasi melalui penerapan berbagai sistem pelayanan berbasis digital guna meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan bagi Masyarakat (Tsabitha et al., 2024).

Meskipun berbagai inovasi pelayanan telah diterapkan, pelaksanaan administrasi dan pelayanan peradilan masih menghadapi berbagai tantangan (Rifhai et al., 2025). Peningkatan jumlah layanan administrasi, perkembangan sistem digital, serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan yang semakin cepat dan berkualitas memerlukan dukungan sumber daya yang memadai agar kualitas pelayanan tetap terjaga (Putri et al., 2024). Kondisi tersebut membuka peluang bagi perguruan tinggi untuk berkontribusi melalui program Praktik Kerja Lapangan sebagai bentuk kolaborasi yang memberikan manfaat bagi mahasiswa maupun lembaga mitra (Sholeh & Safi'i, 2023).

Dalam konteks tersebut, Praktik Kerja Lapangan menjadi salah satu bentuk kegiatan yang memungkinkan mahasiswa terlibat secara langsung dalam berbagai aktivitas pelayanan dan administrasi di lingkungan Pengadilan Negeri Batam (Iryanti et al., 2025). Keterlibatan mahasiswa tidak hanya

memberikan pengalaman praktis dalam memahami mekanisme pelayanan dan administrasi peradilan, tetapi juga dapat membantu mendukung kelancaran pelaksanaan berbagai kegiatan administrative (Afriza & Golam, 2026). Melalui kolaborasi ini diharapkan tercipta sinergi antara dunia pendidikan dan lembaga peradilan dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Berbagai penelitian terdahulu umumnya membahas Praktik Kerja Lapangan sebagai sarana peningkatan kompetensi mahasiswa, pengembangan keterampilan profesional, dan kesiapan memasuki dunia kerja. Namun, kajian yang memandang PKL sebagai bentuk kontribusi terhadap optimalisasi pelayanan publik, khususnya pada lembaga peradilan, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, artikel ini menawarkan perspektif yang menempatkan PKL tidak hanya sebagai media pembelajaran berbasis pengalaman, tetapi juga sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan administrasi peradilan melalui kolaborasi antara perguruan tinggi dan lembaga peradilan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kontribusi Praktik Kerja Lapangan dalam mendukung optimalisasi pelayanan dan administrasi peradilan di Pengadilan Negeri Batam serta menjelaskan bentuk sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga peradilan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan melalui program Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Negeri Batam dengan melibatkan mahasiswa Program Studi S1 Hukum Pidana Islam, Institut Agama Islam Hidayatullah Batam. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada unit pelayanan yang berkaitan dengan administrasi perkara, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), kepaniteraan, serta ruang persidangan sesuai dengan penempatan peserta PKL.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif (Iryanti et al., 2025). Pendekatan ini dipilih karena kegiatan difokuskan untuk mendeskripsikan bentuk kontribusi mahasiswa dalam mendukung pelayanan dan administrasi peradilan melalui keterlibatan secara langsung pada berbagai aktivitas di lingkungan Pengadilan Negeri Batam (Fitria et al., 2025). Melalui pendekatan tersebut, pelaksanaan kegiatan dapat diamati secara menyeluruh sehingga mampu

memberikan gambaran mengenai bentuk kontribusi mahasiswa terhadap optimalisasi pelayanan peradilan.

1. Bentuk Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan diwujudkan melalui beberapa bentuk kegiatan sebagai berikut.

- Pendampingan administrasi perkara, yaitu membantu proses administrasi perkara, pengelolaan dokumen, pencatatan berkas, serta kegiatan administratif lainnya yang mendukung kelancaran pelayanan di lingkungan Pengadilan Negeri Batam.
- Partisipasi dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu berpartisipasi dalam pelayanan informasi, administrasi persuratan, serta mekanisme pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
- Pendampingan implementasi digitalisasi peradilan, yaitu melakukan observasi dan pendampingan terhadap penggunaan sistem e-Court dan E-Berpadu sebagai bagian dari pelayanan berbasis teknologi.
- Observasi praktik persidangan, yaitu mengamati secara langsung jalannya persidangan untuk memahami mekanisme penyelesaian perkara serta penerapan hukum acara di pengadilan.
- Penguatan literasi praktis dan tata kelola pelayanan, yaitu meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai sistem pelayanan peradilan, administrasi perkara, etika profesi, dan tata kelola pelayanan publik.

2. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui tiga tahapan.

- Tahap persiapan, meliputi koordinasi dengan pihak Pengadilan Negeri Batam, observasi awal, identifikasi kebutuhan, serta penyusunan rencana kegiatan PKL.
- Tahap pelaksanaan, meliputi keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan administrasi perkara, pelayanan PTSP, observasi persidangan, pendokumentasian kegiatan, serta pengenalan sistem pelayanan peradilan berbasis digital.
- Tahap evaluasi, dilakukan melalui refleksi terhadap seluruh rangkaian kegiatan untuk menilai bentuk kontribusi mahasiswa serta manfaat kegiatan bagi lembaga mitra dan pengembangan kompetensi mahasiswa.

3. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam kegiatan ini diperoleh melalui beberapa teknik sebagai berikut.

- Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses pelayanan dan administrasi peradilan.
- Partisipasi langsung, yaitu keterlibatan mahasiswa dalam berbagai aktivitas pelayanan dan administrasi selama pelaksanaan PKL.

- Dokumentasi, yaitu mengumpulkan data berupa arsip, laporan kegiatan, foto dokumentasi, serta dokumen pendukung lainnya.
- Studi kepustakaan, yaitu menelaah berbagai buku, jurnal ilmiah, regulasi, dan dokumen yang berkaitan dengan pelayanan publik, administrasi peradilan, serta pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan model analisis interaktif yang meliputi tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan Kesimpulan (Qomaruddin & Sa'diyah, 2024). Analisis dilakukan secara deskriptif untuk menginterpretasikan hasil observasi dan partisipasi mahasiswa sehingga diperoleh gambaran mengenai kontribusi Praktik Kerja Lapangan dalam mendukung optimalisasi pelayanan dan administrasi peradilan di Pengadilan Negeri Batam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Prosedur Pengajuan Perkara di Pengadilan Negeri Batam

Berdasarkan observasi lapangan, prosedur pengajuan perkara di Pengadilan Negeri Batam telah dilaksanakan melalui dua mekanisme, yaitu layanan konvensional melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan layanan digital melalui sistem *e-Court* serta E-Berpadu. Pada perkara pidana, proses dimulai dari pelimpahan berkas oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU), registrasi perkara, penetapan majelis hakim, hingga penjadwalan persidangan. Sementara perkara perdata dilakukan melalui pendaftaran gugatan, pembayaran panjar biaya perkara, registrasi, dan penentuan sidang perdana.

Temuan di lapangan menunjukkan bahwa digitalisasi layanan peradilan memberi kemudahan dalam administrasi perkara dan mempercepat proses layanan.

Tabel 1. Mekanisme Pengajuan Perkara

Tahapan	Pidana	Perdata
Pendaftaran perkara	Pelimpahan JPU	Gugatan/Permohonan
Registrasi	Kepaniteraan pidana	PTSP / e-Court
Penetapan hakim	Ketua PN	Ketua PN
Penjadwalan sidang	Ada	Ada
Sistem digital	E-Berpadu	e-Court

Pembahasan

Temuan ini menunjukkan implementasi asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan mulai diterapkan melalui modernisasi pelayanan berbasis teknologi. Hal ini sejalan dengan konsep

judicial modernization yang menekankan efisiensi administrasi peradilan (Mertokusumo, 2019). Penggunaan e-Court juga sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang administrasi perkara secara elektronik.

Digitalisasi ini memperkuat transparansi dan akses terhadap keadilan (*access to justice*) bagi masyarakat.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan Pengisian Data Tersangka Pidana menggunakan sistem E-Berpadu. (Sumber: Laporan PKL)

1. Mekanisme Penyelesaian Perkara di Pengadilan Negeri Batam
Hasil observasi menunjukkan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Batam dilaksanakan melalui tahapan:

1. Pendaftaran perkara
2. Pemeriksaan administrasi
3. Persidangan dan pembuktian
4. Musyawarah majelis hakim
5. Putusan
6. Upaya hukum (banding/kasasi bila diperlukan)

Dalam perkara perdata ditemukan adanya tahapan mediasi sebelum pemeriksaan pokok perkara, sedangkan dalam pidana fokus pada pemeriksaan pembuktian.

Pembahasan

Mekanisme tersebut menunjukkan sistem litigasi di Pengadilan Negeri Batam berjalan sesuai hukum acara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata, mediasi menunjukkan implementasi PERMA Nomor 1 Tahun 2016 yang menekankan penyelesaian sengketa secara damai.

Secara empiris, proses ini memperlihatkan fungsi pengadilan tidak hanya sebagai lembaga pemutus perkara tetapi juga penyelesai konflik hukum.



Gambar 2. Dokumentasi proses sidang (penyelesaian masalah) di Pengadilan Negeri Batam. (Sumber: Laporan PKL)

2. Implementasi Produk Putusan Hakim Sebagai Bentuk Penegakan Hukum

Salah satu temuan penting selama PKL adalah observasi terhadap produk putusan hakim perkara narkoba Nomor 374/Pid.Sus/2025/PN Btm.

Tabel 2. Ringkasan Produk Putusan

Unsur	Temuan
Jenis perkara	Narkotika
Dasar hukum	Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika
Putusan	7 tahun penjara
Denda	Rp3.000.000.000
Barang bukti	Dirampas untuk dimusnahkan

Majelis hakim mempertimbangkan alat bukti, keterangan saksi, pengakuan terdakwa, serta hal yang memberatkan dan meringankan sebelum menjatuhkan putusan.

Pembahasan

Putusan ini menunjukkan penerapan teori pembuktian negatif menurut undang-undang (*negatief wettelijk bewijs theorie*), yakni hakim menjatuhkan putusan berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim.

Selain itu, putusan tersebut merepresentasikan tujuan pemidanaan berupa efek jera, perlindungan masyarakat, dan penegakan hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo (2018), putusan hakim tidak hanya menegakkan kepastian hukum, tetapi juga harus mencerminkan keadilan dan kemanfaatan.



Gambar 3. Dokumentasi penetapan hukuman kepada para tersangka narkoba. (Sumber: Laporan PKL)

3. Kontribusi PKL Terhadap Kompetensi Praktis Mahasiswa

PKL di Pengadilan Negeri Batam memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa dalam:

- a. Memahami administrasi kepaniteraan
- b. Mengamati proses persidangan
- c. Memahami produk putusan hakim

- d. Mengetahui sistem pelayanan peradilan modern
- e. Melatih keterampilan komunikasi dan etika profesional

Pembahasan

Temuan ini menunjukkan PKL berfungsi sebagai *experiential learning* yang mengintegrasikan teori dan praktik. Model pembelajaran ini penting dalam pendidikan hukum karena kompetensi hukum tidak hanya dibangun secara konseptual, tetapi juga melalui pengalaman lapangan.



Gambar 4. Dokumentasi pengantaran Mahasiswa PKL oleh Dosen Pembimbing. (Sumber: Laporan PKL)



Gambar 5. Dokumentasi Pengantaran surat e-tilang ke gedung sumatra promotion center SPC. (Sumber: Laporan PKL)

SIMPULAN

Berdasarkan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Negeri Batam, kegiatan ini menunjukkan bahwa program PKL tidak hanya berfungsi sebagai sarana pembelajaran berbasis pengalaman bagi mahasiswa, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam mendukung optimalisasi pelayanan dan administrasi peradilan. Keterlibatan mahasiswa dalam pendampingan administrasi perkara, dukungan pelayanan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), pengenalan sistem digitalisasi peradilan melalui *e-Court* dan *E-Berpadu*, serta observasi praktik persidangan telah memberikan kontribusi terhadap efektivitas layanan dan penguatan tata kelola administrasi peradilan.

Pelaksanaan PKL juga memperlihatkan

adanya sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga peradilan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik (Akbar et al., 2025). Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh penguatan kompetensi praktis, sementara lembaga mitra memperoleh dukungan dalam pelaksanaan pelayanan administratif dan penguatan layanan (Azzara & Siregar, 2026). Dengan demikian, PKL dapat menjadi model kolaboratif yang tidak hanya berorientasi pada pembelajaran, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian yang mendukung peningkatan mutu pelayanan hukum dan administrasi peradilan.

SARAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa saran yang dapat diajukan, yaitu:

Bagi Pengadilan Negeri Batam perlu terus mengoptimalkan kolaborasi dengan perguruan tinggi melalui program PKL sebagai bagian dari penguatan pelayanan dan pengembangan sumber daya manusia, termasuk memberikan ruang partisipasi mahasiswa yang lebih luas dalam kegiatan pendukung pelayanan peradilan.

Bagi Perguruan Tinggi Program PKL perlu terus dikembangkan tidak hanya sebagai media pembelajaran lapangan, tetapi juga diarahkan sebagai program pengabdian kolaboratif yang memiliki dampak nyata terhadap lembaga mitra dan pelayanan publik.

Bagi Mahasiswa diharapkan diharapkan dapat memanfaatkan kegiatan PKL sebagai sarana meningkatkan kompetensi profesional, etika kerja, dan pemahaman praktis mengenai sistem pelayanan hukum dan administrasi peradilan.

Bagi pengembangan program selanjutnya diperlukan penguatan model PKL berbasis pengabdian melalui inovasi program pendampingan, penguatan literasi hukum, serta integrasi dukungan terhadap pelayanan peradilan berbasis digital agar kontribusi mahasiswa semakin optimal.

Bagi pengabdian lanjutan Kegiatan serupa dapat dikembangkan lebih lanjut dalam bentuk program pengabdian yang berfokus pada pendampingan layanan hukum, edukasi publik, atau inovasi pelayanan berbasis kebutuhan lembaga peradilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) ini. Penulisan Laporan PKL ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mendapatkan nilai Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada Program Studi S1 Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah/Hukum, Institut Agama Islam Hidayatullah Batam. Penulis

menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, sangatlah sulit bagi penulis untuk menyelesaikan Laporan PKL ini. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ustadz Dr. Muhammad Sidik M.P.D.I Selaku Rektor Institut Agama Islam Hidayatullah Batam, yang telah memberikan kesempatan kami untuk mengikuti kegiatan Magang Kerja Praktek Pengadilan Negeri Batam.
2. Ustadzah Halimatussa Adia, M.H Selaku Dekan Fakultas Hukum Institut Agama Islam Hidayatullah Batam.
3. Ustadz Ahmad Safri, M.Pd. Selaku Dosem Pembimbing, yang turut serta mengarahkan kami dalam mengikuti praktikum Magang Kerja Pengadilan Negeri Batam.
4. Ibu Tiwik, SH., M. Hum, selaku Ketua Pengadilan Negeri Batam yang telah mengizinkan kami untuk mengadakan kegiatan Magang Kerja Praktek Pengadilan Negeri Batam.
5. Bapak Zalik S.H selaku Fasilitator di Pengadilan Negeri Batam yang telah membimbing kami selama mengadakan kegiatan praktik di Pengadilan Negeri Batam.
6. Ibu Rahmawirna S.T. Selaku Sekertaris di Pengadilan Negeri Batam yang telah memberi izin kepada kami 1 kelompok untuk di tugaskan kami di lokasi lokasi tertentu.
7. Seluruh Hakim Pengadilan Negeri Batam Ibu Yianne Marietta, R.M, S.H., M.H., Ibu Monalisa Alita, S.H., M.H., Bapak Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., Ibu Twis Retno Ruswandari, S.H., Bapak Benny Yoga Dharma, S.H., Bapak Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., Bapak Welly Irdianto, S.H., Bapak Verdian Martin, S.H., Bapak Ipan Hasan Lubis, S.H., M.H., Bapak Rinaldi, S.H., M.H., Bapak Andi Bayu Mandala, S.H., M.H., Bapak Ferri Irwan, S.H., M.H., Seluruh Majelis Hakim di Pengadilan Negeri Batam yang telah memberikan kami arahan dan motivasi seputar Ilmu Hukum.

DAFTAR RUJUKAN

- Adiyanta, F. C. S. (2019). Urgensi Good Judiciary Governance Pada Pelayanan Administrasi Lembaga Pengadilan Konstitusi Sebagai Jaminan Bagi Akses Publik Untuk Memperoleh Keadilan. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(3), 257–265.
- Afriza, M. F., & Golam, A. (2026). Pengalaman Magang di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Sebagai Sarana Memahami Peraktik Hukum. *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 4(02).
- Akbar, W., Nopriyani, N., Hasrita, N., Pazira, Z., Harefa, S., Fauzian, E. A., Rizhan, A., & Iqbal, M. (2025). Sinergi Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi dan Aparatur Penegak Hukum dalam Mendukung Efektivitas Pelayanan Publik pada Bagian Pemulihan Aset dan Barang Bukti (PAPBB) Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi”. *Mandala Bakti (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(3), 110–118.
- Azzara, A. S., & Siregar, F. G. (2026). Kontribusi Mahasiswa Magang dalam Penguatan Program Pengabdian kepada Masyarakat di LPPM STIE Ganesha. *Ganesha Journal of Community Economic Empowerment*, 1(1), 41–49.
- Fitria, T. L., Fitri, A. S., atala Rafif, M., & Rizhan, A. (2025). Implementasi PKM Melalui Program Magang Mahasiswa Ilmu Hukum Universitas Islam Kuantan Singingi di Pengadilan Agama Teluk Kuantan. *Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 5(2), 1077–1084.
- Iryanti, I., Febrianti, O., Afrinaldi, R., Saputra, A. E., Sanjaya, S. A., Jelita, Y., & Shilvirichiyanti, S. (2025). Peningkatan Kompetensi Hukum Mahasiswa Melalui Kegiatan Magang Di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan. *Mandala Bakti (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 1(3), 148–157.
- Nisak, H. Z. (2020). Good Governance terhadap Layanan Administratif di Pengadilan Agama Blitar Perspektif Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan. *Sakina: Journal of Family Studies*, 4(3).
- Paramitha, I. S., Limbong, M., & Simbolon, B. R. (2024). Implementasi Praktik Kerja Lapangan Guna Meningkatkan Mutu Lulusan Dan Kesiapan Kerja. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 6(1), 813–822.
- Putri, K., Anggraini, D., Aurora, B., & Damitri, D. (2024). Pelatihan peningkatan akses dan kualitas pelayanan administrasi kependudukan melalui penggunaan teknologi digital di dinas kependudukan dan pencatatan sipil. *Bhakti Nagori (Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 4(1), 23–30.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77–84.
- Rhamayanti, Y., Harahap, H. H., Nasution, A. H., Harahap, B., Wahyuni, P., Lubis, R. H., & Nainggolan, D. F. (2025). Implementasi Kuliah Kerja Lapangan Mahasiswa Ugn Padangsidempuan Dalam Pengembangan Kompetensi Dan Pengabdian Di Desa Siamporik Lombang. *Jurnal Pengabdian Indonesia (JPI)*, 1(2), 81–88.

- Rifhai, M., Tawil, M., & Hamid, A. (2025). Evaluasi Kebijakan Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan Tata Usaha Negara Kota Palu. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 5552–5561.
- Sholeh, M. I., & Safi'i, A. (2023). Strategi hubungan perguruan tinggi dengan market dan bisnis dalam membangun mutu lulusan. *COMPETITIVE: Journal of Education*, 2(4), 235–264.
- Sunusi, S. L., & Arif, H. M. (2025). Pelatihan Kerja Lapangan Dengan Metode Inovatif Dan Kolaboratif Di Instansi Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sulawesi Selatan. *Teknologi Dan Aplikasi Berbasis Edukasi Dan Civitas (TABEC)*, 1(2), 235–244.
- Tsabitha, A., Rahmadhani, A., Pebrianti, K. R., & Zakaria, S. A. (2024). Analisis Penerapan E-Court Dalam Sistem Peradilan Perdata di Indonesia Guna Mewujudkan Peradilan yang Transparan. *Media Hukum Indonesia (MHI)*, 2(4).